



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
RDPU PANITIA KERJA PEMBIAYAAN PENDIDIKAN KOMISI X DPR RI
(BIDANG: PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA,
PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF DAN PERPUSTAKAAN NASIONAL)**

Tahun Sidang	: 2023 – 2024.
Masa Sidang ke-	: V (Lima)
Sifat Rapat	: Terbuka
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU)
Dengan	: 1. Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI). 2. Konferensi Waligereja Indonesia (KWI). 3. Perwakilan Umat Buddha Indonesia (WALUBI). 4. Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI).
Hari/Tanggal	: Rabu, 22 Mei 2024
Pukul	: 10.00 – Selesai
Tempat	: Ruang Rapat Komisi X DPR RI.
Pimpinan Rapat	: Dr. Dede Yusuf, M.E., S.T. M.I.Pol/Wakil Ketua Komisi X DPR RI/Ketua Panja Pembiayaan Pendidikan Komisi X DPR RI.
Sekretaris Rapat	: Dadang Prayitna, S.IP., M.H./Kabagset. Komisi X DPR RI
Agenda acara	: 1. Pengelolaan Pembiayaan Pendidikan oleh Swasta (sumber dan komponen kebutuhan). 2. Penyampaian Data dan Pelaksanaan Program Bantuan Pendidikan oleh Pemerintah kepada Swasta. 3. Usulan Regulasi Pembiayaan Pendidikan untuk Swasta.
Hadir Komisi X DPR RI	: 17 orang dari 30 orang Anggota Panja Pembiayaan Pendidikan Komisi X DPR RI.
Hadir Narasumber	: 1. Johan Tumanduk S.H., M.M., M.Min., MPd.K. Komisi Pendidikan PGI/Majelis Pendidikan Kristen. 2. Pdt. Henrek Lokra, Sekretaris Eksekutif Bidang Keadilan dan Perdamaian PGI. 3. Prof. Yafet Y.W. Rissy, SH., L.L.M., M.Si., Ph.D. Komisi Pendidikan PGI/Univ Kristen Satya Wacana Salatiga. 4. Pdt. Lenta E. Simbolon, Sekretaris Eksekutif Bidang Keesaan dan Pembaruan Gereja PGI. 5. Pdt. Agustinus Setiawidi, Th.D. Komisi Pendidikan PGI/Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Jakarta. 6. Yohanes Vajar Juniyanto, S.Pd., MM., Komisi Pendidikan KWI/Kepala Sekolah SMA Strada.

7. Lili Djayadi, S.Sos. Wakil Sekretaris Jenderal Walubi.
8. Dr. Ir. I Wayan Jondra, M.Si., Ketua Bidang Pendidikan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia PHDI.
9. Ketut Budiawan, SH., S.Pd.H., MH., M.Fil.H., Sekretaris Bidang Pendidikan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia PHDI.
10. K.R.H.T. Astono Chandra Dana, S.E., M.M., M.B.A., Ketua Bidang Keagamaan dan Spiritualitas PHDI.
11. Dr. Budiana Setiawan, S.S., M., Sekretaris Bidang Kebudayaan dan Kearifan Lokal PHDI.
12. Ida Djaka Mulyana, S.H., M.H., Sekretaris Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) PHDI.
13. Ni Luh Puspasari, S.Pt., Sekretaris Bidang Pemberdayaan Perempuan, Pemuda & Perlindungan Anak PHDI.

I. PENDAHULUAN

Rapat Dengar Pendapat Umum Panja Pembiayaan Pendidikan Komisi X DPR RI dibuka pada pukul 10.30 WIB oleh Dr. Dede Yusuf Macan Effendi, ST. M.I.Po/Wakil Ketua Komisi X DPR RI//Ketua Panja Pembiayaan Pendidikan Komisi X DPR RI, setelah kuorum tercapai sebagaimana ditentukan dalam pasal 281 ayat (1) dan pasal 276 ayat (1) Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.

Rapat diawali dengan pengantar Ketua Rapat, dilanjutkan pemaparan narasumber dari Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI), Konferensi Waligereja Indonesia (KWI), Perwakilan Umat Buddha Indonesia (WALUBI), Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) dan menampung pertanyaan dan saran dari Anggota Panja Perguruan Tinggi Komisi X DPR RI.

II. CATATAN/KESIMPULAN

- A. Panja Pembiayaan Pendidikan Komisi X DPR RI menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada narasumber yang telah menyampaikan paparan, masukan, dan saran mengenai biaya pendidikan (bahan terlampir), dengan beberapa poin utama antara lain:
 1. Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI) menyampaikan catatan dan rekomendasi, antara lain sebagai berikut:
 - a. Neoliberalisasi ekonomi di bidang pendidikan telah berlangsung secara massif. Terdapat privatisasi pengelolaan PTN BH dan PTN BLU yang berorientasi profit, dan mengabaikan kualitas produk belajar mengajar, sehingga kebijakan pengelolaan tersebut perlu dievaluasi.
 - b. Pemerintah perlu transparan dalam pengelolaan anggaran pendidikan yang dialokasikan 20% dari APBN/APBD, dan mengajukan skema pembiayaan pendidikan berbasis kinerja terhadap semua lembaga pendidikan, baik negeri maupun swasta.

- c. Pemerintah perlu lebih menunjukkan keberpihakan terhadap lembaga-lembaga pendidikan swasta, terutama terkait dengan pengelolaan lulusan PPG dan Guru Pra-Jabatan.
 2. Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) menyampaikan catatan dan rekomendasi sebagai berikut:
 - a. Pelaksanaan berbagai program bantuan pendidikan dari pemerintah perlu ditingkatkan dan dimaksimalkan, serta memperbaiki transparansi dan menyederhanakan prosedur pelaksanaannya.
 - b. Pemerintah perlu mengatasi kendala pendidikan di daerah terdepan, tertinggal, dan terluar, terutama kendala sarana-prasarana pendidikan, ketersediaan guru, dan dukungan teknologi informasi (TI).
 - c. Pemerintah perlu lebih memperhatikan pengelolaan pendidikan swasta, terutama mengevaluasi kebijakan guru swasta yang lulus PPPK untuk tidak dipindahkan ke sekolah negeri.
 3. Perwakilan Umat Buddha Indonesia (WALUBI) menyampaikan catatan dan rekomendasi, antara lain sebagai berikut:
 - a. Pengelolaan dan penggunaan anggaran pendidikan dari pemerintah harus dilakukan secara transparan dan tepat sasaran.
 - b. Mendorong pemerintah untuk mengalokasikan anggaran dan dana pendidikan khusus kepada Lembaga Pendidikan Agama Buddha.
 4. Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) menyampaikan catatan dan rekomendasi, antara lain sebagai berikut:
 - a. Perguruan Tinggi Swasta merupakan Klaster Binaan yang perlu mendapatkan perhatian khusus terkait dengan pembiayaan pendidikan.
 - b. Kemendikbudristek perlu menyusun standar pembiayaan operasional seluruh jenjang pendidikan, sehingga mempermudah perencanaan dan pengalokasian bantuan dana di setiap lembaga pendidikan negeri maupun swasta.
 - c. Mendorong adanya regulasi yang mengakomodir adanya pemenuhan biaya pendidikan melalui program-program Pemerintah dan Pemerintah Daerah pada pelaksanaan pendidikan di Pasraman.
- B. Terhadap pandangan, penjelasan dan masukan yang disampaikan para narasumber, Panja Pembiayaan Pendidikan Komisi X DPR RI menyampaikan pandangan antara lain:
 1. Mendorong Kemendikbudristek RI untuk melaksanakan program bantuan pendidikan sesuai dengan standar pembiayaan operasional (komponen biaya) dan kebutuhan di masing-masing daerah.
 2. Mendorong PGI, KWI, WALUBI, dan PHDI, untuk menyampaikan dukungan data terkait standar komponen biaya pendidikan yang diselenggarakan oleh Yayasan Keagamaan, sesuai dengan kebutuhan untuk pelaksanaan proses

pendidikan yang dilaksanakan oleh Lembaga Pendidikan Keagamaan Swasta.

3. Mendorong PGI, KWI, WALUBI, dan PHDI, untuk memberikan dukungan terhadap peninjauan penyaluran/distribusi dan penggunaan alokasi anggaran 20% APBN/APBD untuk pendidikan.

C. Bahan paparan dan masukan yang disampaikan para narasumber menjadi bagian tidak terpisahkan dari RDPU hari ini, dan substansinya akan menjadi rujukan dalam penyusunan rekomendasi Panitia Kerja Pembiayaan Pendidikan Komisi X DPR RI kepada Pemerintah.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pada pukul 13.10 WIB.

KETUA RAPAT

TTD

Dr. Dede Yusuf M.E., S.T., M.I.Pol.